

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sistem pemerintahan Indonesia memasuki babak baru dengan adanya pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang desentralistik. Konsep otonomi yang dimaksudkan di sini adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Belu sebagian besar bermukim di pedesaan yang senantiasa mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perhatian pembangunan perlu di arahkan kepada pembagunan pedesaan. Hal ini di lakukan karena masyarakat di pedesaan masih di liputi dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya.

Kebijakan dan program-program yang konkrit dalam mengatasi kemiskinan di rasakan belum cukup dalam konteks kemiskinan di pedesaan. Hal ini di sebabkan karena pelaksanaan proyek atau program yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan kurang berkordinasi dengan proyek atau program sejenis dari instansi atau departemen lainnya. Disisi lain, karena kondisi kemiskinan sangat beragam sedangkan wilayah Indonesia sangat luas sehingga

tidak mudah untuk menyusun program atau proyek penanggulangan kemiskinan dalam bentuk proyek atau program nasional. Alasan lainnya, bahwa menyerahkan sepenuhnya penyusunan dan pelaksanaan program tersebut secara desentralisasi kepada daerah masih dikhawatirkan atau diragukan efisiensinya.

Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) Provinsi NTT tahun 2012, provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, dimana dari 21 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, hanya Kota Kupang yang tidak termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Kondisi alam yang berat dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang sangat terbatas mempengaruhi kehidupan masyarakat NTT. Kondisi geografis wilayah dan topografi daratan yang berbukit-bukit menyebabkan transportasi antar wilayah menjadi sulit, selain itu juga iklim yang kering dan kondisi lahan yang sebagian besar kurang subur menyebabkan biaya ekonomi tinggi, serta sangat rentan terhadap bencana kekeringan dan kerawanan pangan. Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera) diarahkan untuk mampu menciptakan masyarakat desa yang maju dan produktif (*increased income and living standart*).

Program pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tahun 2014-2018 merupakan berkelanjutan dari pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2011-2013 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2013-2018. Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi NTT tahun 2011-2013 bertujuan berikut :

1. Mengurangi angka kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif desa/kelurahan.
2. Memberdayakan kelembagaan pedesaan yang dapat mendukung pelaksanaan empat tekad pembangunan dan delapan agenda pembangunan daerah.
3. Menciptakan calon wirausahawan baru yang dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di desa/kelurahan.

Sedangkan sasaran dari pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi dan daya saing Desa/Kelurahan sesuai dengan basis unggulan.
2. Meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan di Desa/Kelurahan yang memiliki persentase rumah tangga miskin tinggi.
3. Terwujudnya Desa/Kelurahan yang mandiri secara ekonomi dan bebas dari kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengembangkan suatu strategi yang dikemas dalam Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah). Program Desa Mandiri Anggur Merah diluncurkan oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada HUT ke 53 Tanggal 23 Desember 2010. Dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” disebutkan bahwa pemerintah provinsi mengalokasikan *frash money* sebesar 250 juta yang bersumber dari APBD untuk setiap Desa dan setiap Desanya didampingi oleh satu orang pendamping. Melalui Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur

Merah” jumlah dana yang dicairkan ke masyarakat sampai tahun 2017, dapat dibuat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Jumlah Desa Penerima Dana Anggur Merah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2011 – 2017

NO	TAHUN	JUMLAH DESA	BESARNYA DANA
1	2011	287	Rp. 71.750.000.000
2	2012	298	Rp. 74.500.000.000
3	2013	306	Rp. 76.500.000.000
4	2014	589	Rp. 147.250.000.000
5	2015	589	Rp.147.250.000.000
6	2016	589	Rp.147.250.000.000
7	2017	592	Rp. 147.500.000.000
	Jumlah	3.250	Rp. 812.000.000.000

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2018

Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa sejak Program Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah diluncurkan tahun 2011-2017, sudah sebanyak 3.250 desa yang mendapatkan dana hibah dari program ini dan besarnya dana yang di alokasikan sebanyak Rp. 812.000.000.000.

Kabupaten Belu merupakan bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga merupakan salah satu Kabupaten pelaksana Program Mandiri Anggur Merah. Berikut merupakan rincian jumlah dana dan jumlah Desa penerima Dana Hibah Anggur Merah Kabupaten Belu sejak Tahun 2011 hingga tahun 2017.

Tabel 1.2
Data Jumlah Desa Penerima Dana Anggur Merah
Kabupaten Belu
Tahun 2011-2017

NO	TAHUN	JUMLAH KECAMATAN	BESARNYA DANA
1	2011	11	2.750.000.000
2	2012	11	2.750.000.000
3	2013	11	2.750.000.000
4	2014	11	2.750.000.000
5	2015	11	2.750.000.000
6	2016	11	2.750.000.000
7	2017	11	2.750.000.000
Jumlah			19.250.000.000

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi NTT 2018

Adapun bentuk usaha yang dijalankan oleh kelompok masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Belu adalah berupa usaha ternak babi, ternak kambing, ternak ayam, perbengkelan, usaha batu merah, usaha kios, dan usaha sayur-sayuran. Mengingat bentuk usaha yang dijalankan bersama oleh kelompok masyarakat Desa/Kelurahan terancam macet, maka semua usaha yang dijalankan akan diberhentikan dan beralih ke koperasi simpan pinjam.

Kecamatan Tasifeto Timur merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu dan juga merupakan salah satu desa pelaksana program “Anggur Merah”. Adapun bentuk usaha yang dijalankan oleh kelompok masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tasifeto Timur berupa usaha Paronisasi, Ternak Babi, dan koperasi. Kegiatan program yang direncanakan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat mampu meningkatkan efektifitas kegiatan yang berdaya ungkit besar dengan indikasi kegiatan kelompok berjalan dengan baik sehingga mulai melakukan perguliran dana dan pembentukan koperasi simpan pinjam.

Besarnya jumlah dana yang masuk di desa suatu program pembangunan direncanakan dan diimplementasikan berdasarkan masalah dalam suatu Desa/Kelurahan potensi desa bersangkutan dengan harapan menjadi solusi dari masalah program pembangunan. Dampak dari program pembangunan tersebut dilihat pada desa dengan harapan program tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian dalam hal ini pendapatan.

Dengan gulirnya dana langsung kepada kelompok masyarakat usaha ekonomi produktif, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap proses perubahan sikap dan perilaku hidup masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat terlihat dari kerjasama dalam suatu kelompok untuk menjalankan usaha. Keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan tidak menjamin suatu program berhasil dan berkelanjutan. Faktanya menunjukkan bahwa penambahan jumlah masyarakat yang terlibat program pembangunan bukan karena bantuan modal dirasakan oleh desa masyarakat yang sama, namun sebagai akibat dari penambahan jumlah masyarakat yang terus mengalami penurunan.

Dilihat dari tujuan dan Pelaksanaan Program Anggur Merah adalah untuk meningkatkan pendapatan anggota. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Tasifeto Timur, dengan adanya Program Anggur Merah tidak meningkatkan aktifitas pedesaan dan tidak meningkatkan pendapatan perekonomian hal ini di karenakan pengembalian dana yang ada di desa terancam macet.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ‘Evaluasi Dana Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Di Kecamatan Tasifeto Timur Tahun Anggaran 2015-2016’.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Program Terpadu Mandiri Anggur Merah sudah diimplementasikan secara efektif dan efisien?
2. Apakah masalah atau hambatan dalam pengembalian Dana Program Terpadu Mandiri Anggur Merah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) sudah diimplementasikan secara efektif dan efisien.
2. Untuk mengetahui masalah atau hambatan dalam pengembalian Program Terpadu Mandiri Anggur Merah (DeMAM)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi praktisi, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks Program Desa Mandiri Anggur Merah.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi terkait kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja dan hasil dari Program Desa Mandiri Anggur Merah.